



BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Di era informasi seperti sekarang ini, membuat sebagian besar orang di dunia ini untuk tergantung dengan yang namanya “internet”. Bagaimana tidak setiap jam, menit bahkan detik informasi itu terus mengalir dan berganti, sehingga untuk terus dapat mengikuti atau mengetahui informasi yang dibutuhkan pada umumnya orang mencari dengan internet. Internet atau *International Networking* merupakan hubungan dari dua komputer atau lebih, bahkan sampai berjuta-juta komputer (internasional) yang membentuk suatu jaringan yang dapat saling bertukar informasi. Internet menjanjikan kemudahan bagi penggunanya, melalui internet dapat diperoleh segala bentuk informasi dan komunikasi dari seluruh dunia, mulai dari informasi pendidikan, ekonomi, bursa saham, berita politik, bahan riset, periklanan, gaya hidup, hiburan sampai acara ngobrol dan belanja.¹

¹ Astrid dan Erhans A., 2001, *Internet*, PT. Ercontara Rajawali, Jakarta, hal.1



Tabel I.1

Pengguna Internet di Dunia Tahun 2012

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS				
June 30, 2012				
No.	World Region	Population (2012 Est.)	Internet Users Latest Data	Penetration (% Population)
1	Africa	1.073.380.926	167.335.676	15.6 %
2	Asia	3.922.066.987	1.076.681.059	27.5 %
3	Europe	820.918.446	518.512.109	63.2 %
4	Middle East	223.608.203	90.000.455	40.2 %
5	North America	348.280.154	273.785.413	78.6 %
6	Latin America / Caribbean	593.688.638	254.915.745	42.9 %
7	Oceania/ Australia	35.903.569	24.287.919	67.6 %
Total		7.017.846.922	2.405.518.376	34.3 %

Sumber: Diolah dari data di www.internetworldstats.com

Dari Tabel I.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah pengguna internet di dunia sebesar 2.405.518.376 jiwa dan berkisar pada 34,3 % dari total seluruh penduduk dunia sebesar 7.017.846.922 jiwa. Hal ini berarti lebih dari sepertiga orang di dunia menggunakan internet. Kemudian, jika dilihat dari banyaknya pengguna internet pada kawasan negara di dunia, pengguna internet terbanyak yaitu Asia disusul Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah dan Australia. Namun apabila dilihat dari penetrasi penduduk tiap wilayah di dunia, Amerika utara merupakan wilayah dengan penetrasi terbesar yaitu 78,6 % kemudian Australia sebesar 67,6 %, Eropa sebesar 63,2 %, Amerika Latin sebesar 42,9%, Timur Tengah sebesar 40,2%, Asia sebesar 27,5%, Afrika sebesar 15,6%.



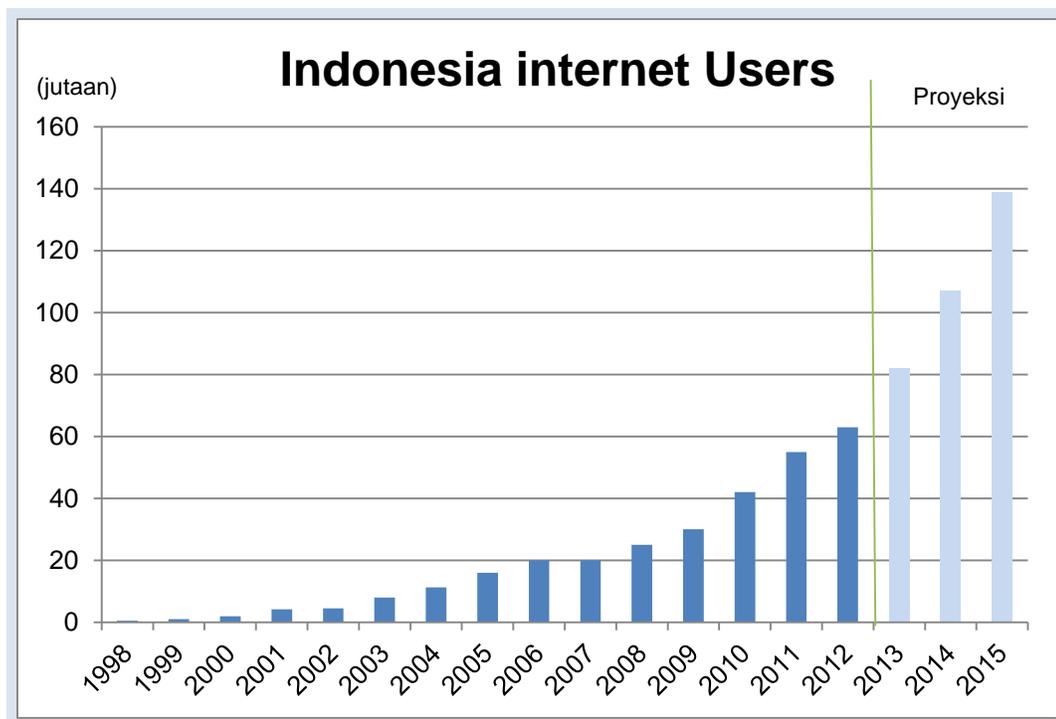
Tabel I.2
Pengguna Internet di Asia Tahun 2012

ASIA INTERNET USER AND POPULATION DATA June 30, 2012				
No.	Asia	Population (2012 Est.)	Internet Users Latest Data	Penetration (% Population)
1	Afganistan	30.439.920	1.320.996	5.0 %
2	Armenia	2.970.495	1.800.000	60.6 %
3	Azerbaijan	9.491.600	4.746.800	50.0 %
4	Bangladesh	141.083.504	8.054.190	5.0 %
5	Bhutan	736.896	150.348	21.0 %
6	Brunei Darussalam	408.786	318.900	78.0 %
7	Cambodia	14.962.665	662.340	4.4 %
8	China	1.343.239.923	358.000.000	40.1 %
9	Georgia	4.570.934	1.300.000	28.4 %
10	Hong Kong	7.153.519	5.329.372	74.5 %
11	India	1.205.073.612	137.000.000	11.4 %
12	Indonesia	248.645.005	55.000.000	22.1 %
13	Japan	127.368.088	101.228.736	79.5 %
14	Kazakhstan	17.522.010	7.884.905	45.0 %
15	Korea, North	24.589.122	--	--
16	Korea, South	48.660.500	40.329.660	82.9 %
17	Kyrgyzstan	5.496.737	2.194.400	39.9 %
18	Laos	6.386.266	592.764	9.0 %
19	Macau	575.025	566.510	98.4 %
20	Malaysia	29.179.952	17.723.000	60.7 %
21	Maldives	394.451	134.860	34.2 %
22	Mongolia	3.179.997	633.999	20.0 %
23	Myanmar	54.584.630	534.930	1.0 %
24	Nepal	29.690.606	2.690.162	9.0 %
25	Pakistan	190.291.129	29.128.970	15.3 %
26	Philippines	103.775.002	33.600.000	32.4 %
27	Singapore	5.323.494	4.015.321	75.0 %
28	Sei Lania	21.491.334	3.222.200	15.0 %
29	Taiwan	23.234.936	17.350.000	75.4 %
30	Tajikistan	7.768.385	1.012.210	13.0 %
31	Thailand	67.091.089	20.100.000	30.0 %
32	Timor Leste	1.143.667	10.293	0.9 %
33	Turkmenistan	5.034.810	252.741	5.0 %
34	Uzbekistan	28.394.180	8.575.042	30.2 %
35	Vietnam	91.530.289	31.034.900	33.9 %
TOTAL ASIA		3.922.066.997	1.076.681.059	27.3 %

Sumber: Diolah dari data di www.internetworldstats.com



Sementara itu, pada Tabel I.2 untuk pengguna internet di Asia, negara Indonesia termasuk dalam 5 besar negara dengan pengguna internet terbanyak di antara negara-negara Asia lainnya dan berada pada posisi ke-4. Selanjutnya negara dengan pengguna internet terbanyak di Asia yaitu pada posisi ke-1 China, kemudian India, Jepang, Indonesia dan Korea Selatan. Namun, dari segi penetrasi Indonesia berada pada posisi ke 20 dengan presentase 22,1% dari jumlah populasi. Dengan presentase sekecil itu, tertinggal jauh dibanding Korea Selatan sebesar 82,5%, Jepang 79,5%, Brunei Darussalam 78%, Singapura 75%, Taiwan 75,4% yang masuk dalam urutan 5 besar pengguna internet di Asia. Selanjutnya, terkait pengguna internet di Indonesia dapat dilihat dari Grafik I.1



Sumber : Data dari www.apjii.or.id

Grafik I.1 Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2012



Dari Grafik I.1 menunjukkan pengguna internet di Indonesia mulai tahun 1998 sampai tahun 2012 selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan, kecuali pada tahun 2006 dan 2007 dengan jumlah pengguna internet yang sama. Trend kenaikan pengguna internet ini juga diproyeksikan akan mengalami perkembangan untuk tahun-tahun berikutnya yakni hingga tahun 2015.

Pada umumnya, perkembangan pengguna internet tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan kemajuan dalam dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Misalnya, dulu internet hanya bisa diakses melalui komputer dan terlalu sulit jika dibawa kemana-mana. Setelah mengalami perkembangan, muncul laptop yang fungsinya sama seperti komputer namun lebih kecil lagi dan bisa dibawa kemana-mana. Kemudian internet juga bisa diakses melalui *handphone* yang lebih mempermudah karena lebih simpel dan komplit. *Handphone* bisa digunakan untuk komunikasi telepon, sms, foto, musik dan internet. Bahkan saat ini dengan *smartphone* semua jadi lebih mudah dan komplit lagi, dimana akses internet yang lebih cepat maupun aplikasi dan progam yang juga lebih banyak.

Walaupun setiap tahunnya pengguna internet di Indonesia terus mengalami perkembangan, tetapi terdapat kesenjangan pengguna internet antara wilayah di Perkotaan dan di Perdesaan. Karena sebagian besar pengguna internet di Indonesia adalah di Perkotaan, sementara di Perdesaan masih bisa dikatakan sangat kurang. Hal ini seperti yang diberitakan oleh sebuah media *online* sebagai berikut:

“Hasil survei yang dilakukan oleh Kominfo, Unicef, dan Universitas Harvard menyebutkan sebanyak 30 juta anak dan remaja di Indonesia menjadi pengguna internet aktif. Mereka menggunakan beragam media digital sebagai



saluran dalam mengakses konten internet. Sementara itu, media digital telah menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang digunakan. Sayangnya, akses internet yang tinggi di perkotaan dan rendah di perdesaan melahirkan kesenjangan digital. “Sebesar 80 persen responden yang disurvei berasal dari wilayah perkotaan di Jawa. Hal ini membuktikan masih terjadi kesenjangan digital yang kuat antara mereka yang tinggal di wilayah perkotaan dan mereka yang tinggal di daerah perdesaan,” ujar Angela Kearney, UNICEF *Country Representative of Indonesia*, di Jakarta.”²

Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuat program yang dinamakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Dari kedua program tersebut yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu evaluasi proses implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet kecamatan (MPLIK). MPLIK dilaksanakan dengan konsep internet keliling dengan menggunakan mobil. Tujuan adanya program ini yaitu mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan. Program ini dimulai sejak tahun 2010 dimana pembiayaannya bersumber pada dana *Universal Service Obligation* (USO) yang merupakan dana kontribusi dari para penyelenggara layanan telekomunikasi (operator) sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.³

² www.koran-jakarta.com (Diakses Tanggal 26 maret 2014 pukul 02.08)

³ Budiman, Ahmad, 2013, *Pengawasan Program Internet Kecamatan*, Jurnal Pemerintahan Dalam Negeri, Vol.V.No.13/I/P3DI/Juli/2013, hal. 17-18



Program MPLIK dibuat Kemenkominfo berdasarkan landasan hukum yaitu UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 2 dan Pasal 6); PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 13 beserta Lampirannya); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 32/PER/M. Kominfo/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8); dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13); serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.⁴

Implementasi program ini menggunakan model *Nett Contract* yakni pemerintah membeli layanan dengan harga sebagian biaya produksi sesuai dengan estimasi besaran defisit. Melalui skema itu, resiko defisit dari penyelenggaraan menjadi tanggungan operator. Untuk kompensasinya, pendapatan operasi menjadi hak operator. Apabila pendapatan operasi lebih rendah dibandingkan biaya pembelian, defisit ditanggung operator. Sedangkan prinsip model kerjasamanya yaitu *The Lowest Subsidy, Affordability* dan *Sustainability*. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) Kemkominfo RI memberikan uang muka kepada pemenang lelang (penyedia jasa). Selanjutnya, pihak

⁴*Ibid*, hal. 17



penyedia jasa akan membayarnya dengan cara BPPPTI mengurangi uang sewa kepada pihak penyedia, setelah program dinyatakan berjalan. Kinerja MPLIK merujuk pada *Service Level Agreement* (SLA) antara BPPPTI dengan pemenang tender (penyedia jasa).⁵

Implementasi atau pelaksanaan dari program ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul baik dari segi teknis maupun non teknis. Hal ini terbukti dari Panja MPLIK Komisi I DPR-RI yang telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo, Kepala BP3TI, Dewas BP3TI, serta para pemenang lelang/perusahaan penyedia MPLIK (PT SIMS, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Jastrindo Dinamik, PT Telkom, PT Radnet, PT Wahana Inovasi Nusantara, PT Multidata Rancana Prima dan PT Jogja Digital) serta melakukan sejumlah kunjungan ke enam daerah dan mendapatkan hasil temuan yaitu:

1. Perencanaan

Program MPLIK tidak mengacu pada perencanaan yang dijalankan tanpa didahului dengan pembangunan sistem pengawasan maupun pembayaran terhadap pelaksanaan program yaitu Sistem Informasi Manajemen Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) yang berfungsi sebagai sistem penyediaan akses internet, sistem monitoring dan manajemen perangkat serta jaringan, dan pusat manajemen distribusi konten. Program MPLIK mulai dilaksanakan tahun 2010, sementara SIMMLIK dilaksanakan 2012.

⁵ *Ibid*, hal. 18



2. Model Pelaksanaan

Penggunaan model kerja sama *Nett Contract* tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari adanya *gap* (Kesenjangan) cukup tinggi antara estimasi dengan realisasi penggunaan anggaran MPLIK, sistem denda tidak serta merta membuat penyedia jasa segera menjalankan SLA dengan baik, pungutan terhadap masyarakat justru menimbulkan adanya kompetisi dengan pengusaha warnet komersial.

3. Penempatan Lokasi

Lokasi MPLIK tidak selamanya ditempatkan di daerah yang ditentukan, seperti antara lain daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi. Sebaliknya, MPLIK ditempatkan di wilayah pusat kota.

4. Kondisi Peralatan

Sebagian perangkat MPLIK tidak berjalan dengan baik atau rusak. Bila terjadi kerusakan, perbaikan dilakukan tidak dengan cepat sehingga mengganggu kinerja pelayanan MPLIK.

5. Kerja Sama dengan Pemda (Kabupaten/ Kota serta Camat)

Sebagian besar Bupati/Walikota dan Camat menuturkan tidak mendapatkan surat dari Kemenkominfo perihal dukungan penyelenggaraan MPLIK di daerah. Selain itu,



sebagian besar pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam koordinasi penentuan titik lokasi MPLIK maupun pemilihan pengelola.⁶

Pelaksanaan program yang sentralistis secara umum seringkali mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Begitu pula pada program Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) kurang lebih 4 tahun dimulai dari tahun 2010 hingga 2014. Namun, berdasarkan beberapa temuan hasil kunjungan dari Panja Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Komisi I DPR-RI dan rapat dengan instansi terkait mengenai permasalahan dalam pelaksanaan program Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK), perlu kiranya suatu langkah untuk melakukan kajian evaluasi proses implementasi program Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Hal ini dimaksudkan supaya dapat mengetahui ketercapaian tujuan program Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Proses implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Hal ini dipahami karena proses implementasi melibatkan interaksi banyak variabel sekaligus merumuskan *delivery activities*. Kompleksitas dalam proses implementasi tidak jarang memunculkan sejumlah permasalahan.⁷

Evaluasi berdasarkan *Joint Committee*⁸ merupakan penelitian yang sistematis atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Sedangkan menurut

⁶ *Ibid*, hal. 19

⁷ Erwan dan Dyah, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, hal. 85

⁸ Tayibnasis, Farida Yusuf, 2008, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk program pendidikan dan penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 4



Yunanda⁹ evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Dari kedua definisi mengenai evaluasi tersebut dapat dikatakan bahwa evaluasi haruslah terencana dan sistematis dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Riset evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama, baik dalam analisis kebijakan, pelaksanaan program maupun proyek. Pertama, dan paling penting ialah bagaimana riset evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, program atau proyek, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini riset evaluasi memiliki fungsi deskriptif dengan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya mengurangi penduduk miskin) dan target tertentu (sebagai contoh, penduduk miskin atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang dari 40 persen menjadi 20 persen pada tahun 2010) telah tercapai.¹⁰

Kedua, riset evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, evaluator

⁹ *Ibid*, hal. 65

¹⁰ Samsul hadi dkk, *op.cit*, hal.46- 47



dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, dan substantif). Dalam hal ini riset evaluasi memiliki fungsi eksplanatif dengan mempertanyakan mengapa suatu program berhasil dengan baik dan program lainnya gagal mencapai tujuan.¹¹

Ketiga, riset evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan dan program atau proyek lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan, program dan proyek dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, program dan proyek. Misalnya, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Riset evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan, program dan proyek yang baru atau revisi kebijakan, program dan proyek dengan menunjukkan bahwa alternatif yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain. Dalam hal ini riset evaluasi berfungsi aplikatif.¹² Oleh karena itu, penelitian terkait evaluasi merupakan suatu yang penting dan memberikan informasi mengenai kinerja implementasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan atau program.

Selanjutnya, menurut Patton¹³ evaluasi implementasi penting untuk diketahui pada tingkatan mana suatu program efektif setelah diterapkan secara penuh, tetapi menjawab pertanyaan itu perlu mengetahui bagaimana dan pada tingkatan mana

¹¹ *Ibid*, hal. 47

¹² *Ibid*, hal. 47

¹³ Patton, Michael Quinn, 2009, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 37



program telah nyata-nyata diterapkan. Kemudian, menurut Williams¹⁴ kurangnya perhatian untuk implementasi sekarang ini merupakan tantangan berat untuk meningkatkan berjalannya program secara kompleks, analisis kebijakan, dan percobaan di wilayah kebijakan sosial. Dari kedua pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa untuk dapat memperbaiki suatu program perlu pemahaman dan perhatian mengenai evaluasi implementasi.

Salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian dan dilakukan riset evaluasi proses implementasi program Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yaitu Kabupaten Malang. Secara umum, jumlah penduduk Kabupaten Malang berada pada posisi kedua terbanyak setelah kota Surabaya, seperti yang terlihat pada Tabel I.3, tetapi secara geografis sangat berbeda, dimana Kota Surabaya sebagian besar wilayahnya perkotaan dan akses internet yang cukup baik, sementara Kabupaten Malang mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu sebanyak 33 kecamatan. Dengan wilayah yang luas itu sebagian besar penduduknya tinggal diwilayah perdesaan dengan akses internet yang kurang

¹⁴ *Ibid*, hal.37



Tabel I.3

Jumlah Penduduk per Kab/Kota Di Jawa Timur Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk (%)
		2012	
1	Kab Pacitan	543.391	1,43 %
2	Kab Ponorogo	857.623	2,23 %
3	Kab Trenggalek	678.876	1,78%
4	Kab Tulungagung	1.002.113	2,63%
5	Kab Blitar	1.126.536	2,96%
6	Kab Kediri	1.518.121	3,99%
7	Kab Malang	2.487.120	6,53%
8	Kab Lumajang	1.014.573	2,67%
9	Kab Jember	2.562.179	6,21%
10	Kab Banyuwangi	1.568.893	4,12%
11	Kab Bondowoso	745.943	1,96%
12	Kab Situbondo	656.691	1,72%
13	Kab Probolinggo	1.113.267	2,93%
14	Kab Pasuruan	1.542.337	4,03%
15	Kab Sidoarjo	2.024.673	5,32%
16	Kab Mojokerto	1.049.967	2,76%
17	Kab Jombang	1.217.560	3,20%
18	Kab Nganjuk	1.023.513	2,69%
19	Kab Madiun	666.373	1,75%
20	Kab Magetan	621.273	1,63%
21	Kab Ngawi	818.871	2,15%
22	Kab Bojonegara	1.218.437	3,20%
23	Kab Tuban	1.131.892	2,97%
24	Kab Lamongan	1.193.725	3,14%
25	Kab Gresik	1.213.449	3,19%
26	Kab Bangkalan	927.433	2,44%
27	Kab Sampang	604.514	1,58%
28	Kab Pamekasan	818.662	2,15%
29	Kab Sumenep	1.033.640	2,77%
71	Kota Kediri	273.679	0,73%
72	Kota Blitar	134.534	0,35%
73	Kota Malang	833.082	2,19%
74	Kota Probolinggo	222.413	0,58%
75	Kota Pasuruan	190.045	0,50%
76	Kota Mojokerto	122.350	0,32%
77	Kota Madiun	172.421	0,45%
78	Kota Surabaya	2.801.409	7,36%
79	Kota Batu	194.793	0,51%
	Jawa Timur	38.052.950	100%

Sumber : Diolah dari data di www.jatim.bps.go.id

Kabupaten Malang mendapatkan 10 unit Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dan dalam pelaksanaannya 1 mobil di bagi ke beberapa kecamatan. Untuk pelaksanaan program Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang dilakukan oleh jasa pemenang tender/pihak ketiga yaitu



PT. Jogja Digital. Namun, beberapa permasalahan muncul dalam pelaksanaan program Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di daerah tersebut, misalnya terdapat kasus yang sama seperti temuan Panja Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Komisi I DPR-RI yaitu dalam hal pengawasan yang disebut Sistem Informasi Manajemen Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) yang pada pelaksanaannya tidak bersamaan dengan mulai dilaksanakannya program Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK), dimana program Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) mulai resmi dilaksanakan tahun 2010, sementara SIMMLIK baru tahun 2012 mulai diadakan atau berjalan.

Hal ini berarti selama 2 tahun berjalannya program Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tanpa adanya pengawasan terkait kelayakan akses internet maupun konten yang harus dilaksanakan sesuai peraturan yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi “SIMMLIK dilaksanakan oleh BPPPTI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berfungsi sebagai: a. sistem penyediaan akses internet; b. sistem monitoring dan manajemen perangkat serta jaringan; dan c. pusat manajemen distribusi konten.” Sehingga yang perlu menjadi perhatian dengan keterlambatan SIMMLIK yaitu apakah akan berdampak pada ketercapaian tujuan dan kelompok sasaran yang telah ditetapkan.



Pelaksanaan program Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang ini tidak sesuai dengan wilayah yang seharusnya menjadi perhatian khusus atau sasaran utama yaitu lokasi yang menjadi tempat berhentinya Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) hanya ditempat-tempat tertentu yang notabene bukan sasaran utama, karena masih banyak ditemui di lapangan Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) digunakan di daerah yang cukup mudah untuk akses internet. Bapak Khoirul Anwar sebagai Kabid Kominfo Kabupaten Malang:

“...MPLIK ini kan untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil mas yang sulit untuk akses internetnya. Tapi, keberadaan MPLIK ini ditiapa kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan ada daerah yang sebenarnya tidak membutuhkan seperti daerah yang dekat dengan perkotaan karena mayoritas masyarakatnya mudah akses internet, apalagi sekarang dengan *smartphone* juga sudah bisa untuk internet. MPLIK ini kan juga untuk pengenalan internet, lah wong masyarakatnya sudah paham apanya yang dikenalkan...”¹⁵

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 1 ayat 9 yang berbunyi “Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet kecamatan yang selanjutnya disebut WPUT Internet Kecamatan adalah lokasi penyediaan jasa akses internet pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan yang daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang

¹⁵ Wawancara Bapak Khoirul Anwar di Ruang Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, pada tanggal 25 November 2014, pukul 11.03



belum tersedia akses internet untuk umum dengan harga terjangkau.” Selanjutnya, pasal 1 ayat 12 yang berbunyi “PLIK yang bersifat bergerak adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang memiliki kemampuan berpindah tempat (*mobile*) untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh Layanan PLIK yang bersifat tetap di WPUT Internet Kecamatan.”

Penelitian terdahulu terkait evaluasi yang menjadi rujukan dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anita Anisyah¹⁶ dengan judul Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Perpustakaan keliling (Studi Kasus pada Yayasan Kesejahteraan Anak Indoneisa di Kelurahan Kwitang dan Kelurahan Pendegan). Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pada *input*, berdasarkan model logika (*logic model*) yang dijadikan objek penelitian adalah koleksi, fasilitas dan Sumber Daya Manusia. Pada proses, mencakup jenis layanan peminjaman buku pada perpustakaan keliling, tempat dan waktu penyelenggaraan perpustakaan keliling, tahapan pelaksanaan perpustakaan keliling dan pelayanan yang diberikan. Faktor penghambat, antara lain: Adanya pungutan liar; kondisi armada Perpustakaan keliling yang kurang ideal; keterbatasan jenis dan jumlah buku; kesulitan dalam perolehan dana; kapabilitas petugas kurang memadai; kurangnya supervisi secara personal yang diberikan dari koordinator program; dan ketiadaan evaluasi pada program Perpustakaan Keliling sejak awal dijalankan hingga sekarang. Faktor pendukung, antara lain; dukungan mitra kerja dalam pengadaan armada, sumbangan buku-buku,

¹⁶ Anisyah, Anita, 2011, *Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Perpustakaan keliling: Studi Kasus pada Yayasan Kesejahteraan Anak Indoneisa di Kelurahan Kwitang dan Kelurahan Pendegan*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok



maupun biaya operasional; kekompakan petugas; dan antusiasme pengunjung dan warga terhadap Perpustakaan Keliling.

Pada penelitian Anita tersebut, dalam menganalisis dan menilai proses pelaksanaan program menggunakan aspek *input* dan proses serta adanya faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan. Sedangkan pada penelitian ini, dalam menganalisis dan menilai proses implementasi program menggunakan kriteria evaluasi efektivitas dengan aspek kinerja implementasi dan kriteria efisiensi dengan aspek *input* dan *output*.

Dari paparan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan riset evaluasi ini pada kajian proses implementasi program. Proses pelaksanaan program merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui apakah berjalannya program sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya ataukah tidak, sehingga nantinya dapat diketahui proses dari pelaksanaan program Mobil pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini. Oleh Karena itu, judul yang diusulkan dalam penelitian ini adalah evaluasi implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian pada riset evaluasi ini yaitu apakah implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang sesuai dengan rencana implementasi yang telah ditetapkan?



I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu untuk mendeskripsikan hasil penilaian tentang kesesuaian implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang dengan rencana implementasi yang telah ditetapkan.

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini mengandung manfaat penting yang dapat diambil baik dari segi akademis maupun praktis. Manfaat itu meliputi :

- Manfaat akademis :

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan perbandingan dalam rangka penelitian serta pengembangan lebih lanjut tentang riset evaluasi pada proses implementasi program. Dengan mengambil rujukan berdasarkan studi terdahulu yaitu Skripsi yang ditulis oleh Anita Anisyah dengan judul Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Perpustakaan keliling (Studi Kasus pada Yayasan Kesejahteraan Anak Indoneisa di Kelurahan Kwitang dan Kelurahan Pendegan). Pada penelitian Anita tersebut menganalisis dan menilai proses implementasi program menggunakan aspek input dan proses serta adanya faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan. Sedangkan pada penelitian ini, dalam menganalisis dan menilai proses implementasi program



menggunakan kriteria evaluasi efektivitas dengan aspek kinerja implementasi dan kriteria efisiensi dengan aspek *input* dan *output*.

- Manfaat praktis :

Memberikan gambaran dan informasi khususnya mengenai evaluasi proses implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) serta memberikan rekomendasi-rekomendasi yang berguna untuk perbaikan program ke depannya. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait, dalam hal ini pemerintah maupun pihak pelaksana Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang notabene dari swasta. Selain itu dapat menjadi bahan rujukan jika selanjutnya program ini diteruskan atau akan melaksanakan program yang sama dengan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), supaya dalam pelaksanaannya nanti akan lebih baik lagi.

I.5. Kerangka Teoritik

Untuk dapat menjelaskan masalah yang diteliti dalam penelitian, tentunya diperlukan suatu landasan berpikir yang dapat dijadikan pedoman yang disebut kerangka teori. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁷

¹⁷ Prastowo, Andi, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hal. 18



Oleh karena itu, untuk dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, rangkaian konsep yang dijadikan pedoman oleh peneliti yaitu dalam sub-bab yang pertama Evaluasi Implementasi Program. Dalam sub-bab kebijakan publik dijelaskan mengenai konsep dan pengertian Evaluasi, Implementasi, Program dan Evaluasi Program serta Evaluasi Implementasi Program

Kedua, konsep yang digunakan yaitu program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Selanjutnya, konsep ketiga yaitu Evaluasi Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Dalam konsep Evaluasi Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dijelaskan pula mengenai konsep Pendekatan Evaluasi Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dan Kriteria Evaluasi Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) serta dijelaskan pula mengenai kriteria yang sesuai dengan penelitian ini yaitu Efektivitas dan Efisiensi.

Dari konsep-konsep yang disebutkan di atas, merupakan serangkaian konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Dari beberapa konsep tersebut memberikan sebuah pemahaman yang terkonstruksi dengan baik, sehingga dapat menggambarkan hubungan antar konsep dari penelitian yang berjudul Evaluasi Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang.



1.5.1 Evaluasi Implementasi Program

1.5.1.1 Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen yang dimana meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu “*evaluation*” yang berarti penilaian atau penaksiran.¹⁸ Menurut Yunanda¹⁹ evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Selanjutnya, menurut Supriyanto dan Damyanti²⁰ evaluasi atau kegiatan penilaian merupakan bagian integral dari fungsi manajemen dan didasarkan pada sistem informasi manajemen. Evaluasi dilaksanakan karena adanya dorongan atau keinginan untuk mengukur pencapaian hasil kerja atau kegiatan pelaksanaan program terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Definisi tentang evaluasi dalam beberapa literatur dari beberapa pakar sangat beragam. Kemudian Morris Schaefer mendefinisikan evaluasi sebagai “*evaluastion that part of the decision making process, in which information about action and their result are systematically*

¹⁸ Arikunto dan Jabar, 2008, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 27

¹⁹ *Ibid*, hal. 65

²⁰ Supriyanto dan Damyanti, 2007, *Perencanaan dan Evaluasi*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 209



assessed against norms and their criteria, in order to select among alternatives for the future.”²¹ Selanjutnya, pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *oxford Anvanced Learner’s Dictionary of Current English* evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan.²²

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hikmat²³ bahwa evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek. Selanjutnya, riset evaluasi yang diungkapkan oleh Dunn²⁴, yaitu:

“...istilah riset evaluasi mempunyai arti yang berhubungan dan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi sendiri dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dan program atau proyek dalam arti satuan nilainya. Secara lebih spesifik riset evaluasi bekmakna sebagai proses memproduksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, program, atau proyek. Ketika hasil kebijakan, program dan proyek pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil

²¹ *Ibid*, hal. 209

²² Arikunto dan Jabar, *op.cit*, hal. 1

²³ *Ibid*, hal. 3

²⁴ Samsul hadi dkk, *op.cit*, hal.14-15



tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan, program dan proyek telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan, program dan proyek dirumuskan secara jelas atau diatasi...”

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan prosedur penilaian pelaksanaan kerja dan hasil kerja secara menyeluruh dengan membandingkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, serta menilai seberapa jauh telah terjadi penyimpangan dan ketidakpastian sehingga dapat segera memberikan rekomendasi guna memperbaiki pelaksanaan atau program.

1.5.1.1.1 Jenis-jenis evaluasi

Secara umum, evaluasi dibagi menjadi atas tiga jenis yaitu :

1. Evaluasi pada tahap perencanaan

Kata “ evaluasi” sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu diperlukan berbagai teknik yang dapat dipakai oleh perencana. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dari permasalahannya sendiri.



2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan *monitoring*/pengendalian. *Monitoring* menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa proyek tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. *Monitoring* melihat apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan. Sedangkan, evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuannya, apakah tujuan tersebut sudah berubah, apakah pencapaian hasil proyek tersebut akan memecahkan masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan proyek tersebut, baik membantu atau menghambat.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Disini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaannya yang dinilai dan dianalisa bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana, tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.



1.5.1.1.2 Fungsi Evaluasi

Menurut Dunn²⁵ evaluasi kebijakan berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik, karenanya sebuah kajian evaluasi harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas tersebut, yakni:

- a. **Memberikan Eksplanasi** yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan. Untuk itu dalam studi evaluasi perlu dilakukan penelitian/kajian tentang hubungan kausal atau sebab akibat.
- b. **Mengukur Kepatuhan**, yakni mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. **Melakukan Auditing** untuk melihat apakah *output* kebijakan sampai pada sasaran yang dituju? Apakah ada kebocoran dan penyimpangan pada penggunaan anggaran, apakah ada penyimpangan tujuan program, dan pada pelaksanaan program.
- d. **Accounting** untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Misalnya seberapa jauh program yang dimaksud mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, adakah dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan, adakah dampak yang tak diharapkan.

²⁵ Triana, Wahyuni Rochyati, 2011, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Revka Petra Media, Surabaya hal. 114-115



1.5.1.1.3 Pendekatan dalam evaluasi

Berikut ini terdapat 3 pendekatan dalam evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn²⁶, yaitu:

1. Evaluasi Semu

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

Dalam evaluasi-semu analisis secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (rancangan eksperimental-semu, kuesioner, *random sampling*, teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variabel masukan dan proses. Namun, setiap hasil kebijakan yang ada (misalnya, jumlah lulusan pelatihan yang diperkerjakan, unit-unit pelayanan medis yang diberikan, keuntungan pendapatan bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat. Bentuk-bentuk utama dari evaluasi semu mencakup ekperimentasi sosial, akuntansi sistem sosial, pemeriksaan sosial, dan sintesis penelitian dan praktik.

²⁶ Dunn, William N., 2003, *pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi kedua*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 613-620



2. Evaluasi Formal

Evaluasi formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam evaluasi formal analisis menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik: untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Meskipun demikian perbedaannya adalah bahwa evaluasi formal menggunakan Undang-Undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluatif yang paling sering digunakan adalah efektifitas dan efisiensi.

Salah satu tipe evaluasi formal adalah evaluasi sumatif yang meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu



kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi sumatif diciptakan untuk menilai prodek-produk kebijakan dan program publik yang stabil dan mantab. Sebaliknya, evaluasi formatif meliputi usaha-usaha untuk secara terus-menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target formal. Perbedaan antara evaluasi sumatif dan formatif tidak seharusnya dilebih-lebihkan meskipun demikian karena perbedaan utama dari karakteristik dari evaluasi formatif adalah jumlah titik waktu dimana hasil kebijakan dipantau. Karena itu, perbedaan antara evaluasi sumatif dan formatif adalah persoalan derajat.

Tabel I.4

Tipe-tipe evaluasi formal

Kontrol terhadap aksi kebijakan	Orientasi terhadap proses kebijakan	
	Formatif	Sumatif
Langsung	Evaluasi perkembangan	Evaluasi eksperimental
Tidak langsung	Evaluasi proses retrospektif	Evaluasi hasil retruspektif

Sumber: Dunn, William N., 2003, *pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi kedua*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 615

Variasi evaluasi formal :

- a. Evaluasi perkembangan, menunjuk pada kegiatan-kegiatan/aktivitas evaluasi yang secara eksplisit diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf



program. Evaluasi perkembangan berguna “untuk mengalihkan staf dari kelemahan yang baru dimulai atau kegagalan yang tidak diharapkan dari program dan untuk meyakinkan layak tidaknya operasi yang dilakukan mereka yang bertanggungjawab terhadap operasinya.”

- b. Evaluasi proses retrospektif meliputi pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi proses retrospektif, yang cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama implementasi kebijakan dan program, tidak diperkenankan dilakukannya manipulasi langsung terhadap masukan (misalnya pengeluaran) dan proses (misalnya sistem pelayanan alternatif). Sebaliknya, evaluasi proses retrospektif lebih menggantungkan pada *deskripsi ex post facto* (retrospektif) tentang kegiatan aktivitas program yang sedang berjalan, yang selanjutnya berhubungan dengan keluaran dan dampak. Evaluasi proses retrospektif mensyaratkan adanya sistem pelaporan yang mantab yang memungkinkan pemunculan yang berkelanjutan informasi yang berhubungan dengan program (misalnya: jumlah kelompok-kelompok sasaran yang dinilai, tipe-tipe pelayanan yang disediakan, dan karakteristik personel yang dipekerjakan pada program-program staf). Sistem informasi manajemen (*Management information system*) pada badan-badan publik kadang-kadang memungkinkan dilakukannya evaluasi proses retrospektif, menyangkut baik informasi tentang proses maupun hasil.



- c. Evaluasi eksperimental meliputi pemantauan dan evaluasi hasil di bawah kondisi kontrol langsung terhadap masukan dan proses kebijakan. Evaluasi eksperimental yang ideal secara umum merupakan faktor “eksperimen ilmiah yang terkontrol”, dimana semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan kecuali satu yaitu variabel-variabel proses dan masukan khusus dikontrol, dipertahankan konstan, atau diperlakukan sebagai hipotesis tandingan yang masuk akal.
 - d. Evaluasi hasil retrospektif juga meliputi pemantauan dan evaluasi hasil tetapi tidak disertai dengan kontrol langsung terhadap masukan-masukan dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi. Paling jauh adalah kontrol secara tidak langsung atau kontrol statistik yaitu evaluator berusaha mengisolasi pengaruh dari banyak faktor lainnya dengan menggunakan metode kuantitatif. Pada umumnya, terdapat dua varian utama evaluasi proses retrospektif yaitu studi lintas seksional dan studi longitudinal.
3. Evaluasi keputusan teoritis

Evaluasi keputusan teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa, evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan



membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak yang mempunyai andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan (sebagai contoh, staf tingkat menengah dan bawah, pegawai pada badan-badan lainnya, kelompok klien) dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target dimana kinerja nantinya akan diukur.

Evaluasi keputusan teoritis merupakan cara untuk mengatasi beberapa kekurangan dari evaluasi semu dan evaluasi formal:

a. Kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kinerja

Sebagian besar informasi yang dihasilkan melalui evaluasi kurang digunakan atau tidak pernah digunakan untuk memperbaiki pembuatan kebijakan. Untuk sebagian, hal ini karena evaluasi tidak cukup responsif terhadap tujuan dan target dari pihak-pihak yang mempunyai andil dalam perumusan dan implementasi kebijakan dan program.

b. Ambiguitas kinerja tujuan. Banyak tujuan dan program publik yang kabur.

Ini berarti bahwa tujuan umum yang sama misalnya untuk meningkatkan kesehatan dan mendorong konservasi energi yang lebih baik dapat menghasilkan tujuan spesifik yang saling bertentangan satu terhadap lainnya. Ini dapat terjadi jika diingat bahwa tujuan yang sama (misalnya, perbaikan kesehatan) dapat dioperasionalkan ke dalam paling sedikit enam macam kriteria evaluasi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan,



responsivitas dan kelayakan. Salah satu tujuan dari evaluasi keputusan teoritis adalah untuk mengurangi kekaburan tujuan dan menciptakan konflik antar tujuan spesifik atau target.

- c. Tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Tujuan dan target kebijakan dan program-program publik tidak dapat secara memuaskan diciptakan dengan memusatkan pada nilai-nilai salah satu atau beberapa pihak (misalnya kongres, kelompok klien yang dominan atau kepala administrator). Dalam kenyataan, berbagai pelaku kebijakan dengan tujuan dan target yang saling berlawanan Nampak dalam hampir semua kondisi/situasi yang memerlukan evaluasi. Evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk mengidentifikasi berbagai pelaku kebijakan ini dan menampakkan tujuan-tujuan mereka.

Salah satu tujuan utama dari keputusan evaluasi teoritis adalah untuk menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari berbagai pelaku kebijakan. Asumsi dari keputusan evaluasi teoritis adalah bahwa tujuan dan sasaran dari pelaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun secara tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan dan program. Dua bentuk utama dari evaluasi teoritis kebijakan adalah penaksiran evaluabilitas dan analisis utilitas multiatribut, keduanya berusaha menghubungkan informasi mengenai hasil kebijakan dengan nilai dari berbagai pelaku kebijakan.



Tabel I.5

Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-bentuk utama
Evaluasi semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	Eksperimentasi sosial Akuntansi sistem sosial Pemeriksaan sosial Sintesis riset dan praktik
Evaluasi formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program-kebijakan	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat dan nilai	Evaluasi perkembangan Evaluasi eksperimental Evaluasi proses retrospektif Evaluasi hasil retrospektif
Evaluasi keputusan teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi Analisis utilitas multiatribut

Sumber: Dunn, William N., 2003, *pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi kedua*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 619

1.5.1.1.4 Kriteria dalam evaluasi

Terdapat 6 kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn²⁷ seperti yang terlihat pada Tabel I.6

²⁷ *Ibid*, hal. 621



Tabel I.6

Kriteria Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Afektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-hicks Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survai warga Negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: Dunn, William N., 2003, *pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi kedua*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 620

Sedangkan menurut Poister²⁸ terdapat 6 kriteria dalam riset evaluasi, yaitu:

- a. Effectiveness (Efektivitas, keefektifan)

Kriteria ini berkaitan dengan apakah suatu program atau proyek mencapai hasil atau akibat yang diharapkan atau mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan oleh program atau proyek. Pada umumnya

²⁸ Samsul Hadi, Dkk, *op.cit*, hal. 114-116



efektivitas diukur berdasarkan unit produk, jasa layanan program atau nilai moneterinya karena secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis.

b. *Efficiency* (Efisiensi)

Kriteria ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa banyak suatu usaha diperlukan guna mencapai hasil atau tujuan program dan proyek yang diharapkan. Jadi efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi yang juga seringkali ditentukan atau diukur dari ongkos moneter dan ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Suatu program atau proyek dikatakan efisien apabila mencapai efektivitas sangat tinggi namun dengan menggunakan dana atau biaya paling rendah.

c. *Adequacy* (kecukupan)

Kriteria ini berhubungan dengan pertanyaan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan para pihak yang terlibat dalam program atau proyek dalam memecahkan suatu masalah. Kriteria kecukupan lebih menekankan pada pola hubungan antara alternatif desain program atau proyek dengan hasil atau tujuan yang diinginkan.

d. *Equity* (kesamaan atau perataan)

Kriteria kesamaan atau perataan menunjuk pada kemampuan program atau proyek dalam menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-



beda. Jadi kriteria ini berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat atau hasil dan usaha secara adil.

e. Responsiveness (responsivitas)

Kriteria ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh hasil suatu program atau proyek dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Empat kriteria terdahulu biasanya belum dipandang memuaskan apabila belum juga menyertakan kriteria responsivitas.

f. Appropriateness (ketepatan atau kelayakan)

Kriteria ini erat sekali hubungannya dengan rasionalitas substantif sebab pertanyaan tentang ketepatan atau kelayakan suatu program atau proyek tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu melainkan dua atau lebih secara bersama-sama. Ketepatan atau kelayakan program dan proyek menunjuk pada nilai atau harga dari tujuan program atau proyek dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut sebagaimana terpapar dalam matriks program/proyek (logika kerangka kerja program). Kriteria ketepatan atau kelayakan tidak dapat didefinisikan secara baku karena dimaksudkan untuk menjangkau ke luar kriteria yang sudah ada. Cara terbaik untuk menentukan kriteria ini ialah dengan menggabung-gabungkan sejumlah kriteria lain, misalnya, kriteria keadilan dan efisiensi; efisiensi, efektivitas dan keadilan, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini evaluasi implementasi program diartikan sebagai penilaian terhadap serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana



kebijakan dalam rangka melaksanakan keputusan yang telah dibuat yang diwujudkan dalam pelaksanaan program dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

1.5.1.2 Implementasi

Kata implementasi dalam kamus Webster hanya dinyatakan sebagai: menyediakan sarana untuk menjalankan kebijakan publik. Bagaimana wujud 'sarana' tersebut agar kebijakan publik dapat berjalan? Definisi yang diberikan oleh Paul A. Sabatier dan D.A. Mazmanian²⁹, yang memandangnya sebagai bagian dari proses kebijakan - berikut ini mungkin dapat memperjelasnya:

“Implementation is the carrying out a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive or court decisions. Ideally that the decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued and in a variety of ways, structures the implementation process.”

Sabatier & Mazmanian menegaskan bahwa implementasi kebijakan berarti mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum - bisa berbentuk undang – undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dan lain-lain dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan. Program – program inilah yang kemudian disusun struktur pengimplementasiannya agar selanjutnya menghasilkan perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh kebijakan yang dimaksud.

²⁹ Triana, Rochyati Wahyuni, *op. cit.*, hal. 21



Karena implementasi merupakan perwujudan nyata dari (isi/tujuan) kebijakan publik, maka aktifitas-aktifitas implementasi haruslah dilakukan secara cermat. Bahwa memang ada kebijakan yang bersifat *self executed*, yakni yang dapat langsung dilaksanakan, tidaklah mengurangi makna penting dari kecermatan dalam menyusun proses implementasi, sebab dari hasil implementasi tersebut kinerja pemerintah dapat dinilai. Selain itu sebagai bagian dari proses kebijakan, maka dari hasil implementasilah kebijakan memperoleh umpan balik, apakah perlu kebijakan direvisi atau tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Sabatier dan Mazmanian³⁰:

“The process normally runs through a number of stages beginning with passage the basic statute, followed by policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those outputs, the perceived impacts of agency decisions, an finally important revisions (or attempted revisions) in the basic statute”.

Sedangkan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn³¹, menguraikan batasan implementasi sebagai:

“policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This include both one time efforts to transform decisions into operational terms, as well as conditionuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions”.

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu tindakan-tindakan ini, berusaha

³⁰ *Ibid*, hal. 22

³¹ Widodo, Joko, 2008, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*, PT. Bayumedia, Malang, hal. 86



mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan dalam penelitian ini, bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1.5.1.3 Program

Sebuah kebijakan publik dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah-masalah publik yang memerlukan intervensi pemerintah. Suatu kebijakan baru dapat dilaksanakan jika dioperasionalkan ke dalam bentuk program. Menurut Bintoro Tjockroamidjojo³² yang dimaksud dengan program adalah:

“... is taken to mean a form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. It often consist of an interrelated group of ‘project’ and usually limited to one or more on organizations and activities.” (Program adalah suatu aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu yang spesifik dalam ruang dan waktu yang terbatas yang terdiri dari berbagai proyek yang saling berhubungan dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas).

Dari pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa suatu program dibuat untuk mendukung pencapaian tujuan tertentu yang ada pada suatu rencana operasional tahunan atau kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah. Dari suatu kebijakan publik yang berisi tertang rencana operasional tahunan kemudian

³² Tjockroamidjojo, Bintoro, 1990, *Perencanaan Pembangunan*, CV Masagung, Jakarta, hal 194



diterjemahkan oleh suatu program-program yang kemudian diperinci lagi dalam proyek-proyek kegiatan.

Tjockroamidjojo³³ menambahkan mengenai ciri-ciri program yang baik yaitu:

- a. Tujuan yang dirumuskan harus jelas.
- b. Penentuan peralatan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan tidak berdiri sendiri
- f. Berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa program merupakan suatu bentuk operasional dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu.

1.5.1.4 Evaluasi Program

Menurut Arikunto dan Jabar³⁴ evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan. Sementara, Ralp Tyler³⁵ mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk

³³ *Ibid*, hal 195-196

³⁴ Arikunto dan Jabar, *op.cit*, hal. 14

³⁵ *Ibid*, hal. 38



mengetahui apakah tujuan program sudah terealisasi. Sedangkan, Cronbach dan Stufflebeam³⁶ mengungkapkan bahwa evaluasi program adalah upaya untuk menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan

Dari beberapa definisi mengenai evaluasi program dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah suatu proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan standar baku yang telah ditetapkan guna mengetahui apakah tujuan program sudah terealisasi.

1.5.1.5 Evaluasi Implementasi Program

Program merupakan bentuk operasional dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Pelaksanaan suatu program tidak jarang ditemui adanya permasalahan-permasalahan yang muncul, sehingga hal ini dapat berdampak pada ketercapaian tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melakukan penilaian mengenai kinerja dari pelaksanaan program, diperlukan suatu kajian riset evaluasi. Sementara, evaluasi implementasi menurut Patton³⁷ penting untuk diketahui pada tingkatan mana suatu program adalah efektif setelah diterapkan secara penuh, tetapi untuk menjawab pertanyaan itu pertama kali perlu mengetahui bagaimana dan pada tingkatan mana program telah nyata-nyata diterapkan.

³⁶ *Ibid*, hal. 78

³⁷ Patton, Michael Quinn, *op.cit*, hal. 37



Dalam melakukan evaluasi dari pelaksanaan suatu program perlu suatu pendekatan agar dapat menentukan metode yang dipakai. Setelah mengetahui pendekatan suatu program yang ingin dievaluasi, maka selanjutnya yaitu menentukan kriteria yang dipakai untuk menganalisis pelaksanaan program tersebut.

Dalam penelitian ini evaluasi implementasi program diartikan sebagai penilaian terhadap serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dalam rangka melaksanakan keputusan yang telah dibuat yang diwujudkan dalam pelaksanaan program dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

1.5.2 Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)

Pada dasarnya suatu kebijakan publik yang dioperasionalkan ke dalam program, dibuat untuk memecahkan masalah-masalah publik. Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI). Hal-hal yang terkait program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), yaitu sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

Program MPLIK dilaksanakan Kemkominfo berdasarkan landasan hukum yaitu UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 2 dan Pasal 6); PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 13 beserta Lampirannya); Peraturan



Menteri Komunikasi dan Informatika No. 32/PER/M. Kominfo/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8); dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13); serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.³⁸

b. Tujuan dan Sasaran

Dengan tujuan mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan.

c. Pendanaan

Program ini dimulai sejak tahun 2010 di mana pembiayaannya bersumber pada dana Universal Service Obligation (USO) yang merupakan dana kontribusi dari para penyelenggara layanan telekomunikasi (operator) sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.³⁹

³⁸ *Ibid*, hal. 17-18.

³⁹ Budiman, Ahmad, *op.cit*, hal. 17



Total nilai Kontrak Multi Years MPLIK selama empat tahun (48 bulan) adalah PLIK sebesar Rp1.592.276.923.878,-.⁴⁰

d. Pelaksanaan

Implementasi program ini menggunakan model kontrak Nett Contract yakni pemerintah membeli layanan dengan harga sebagian biaya produksi sesuai dengan estimasi besaran defisit. Melalui skema itu, risiko defisit dari penyelenggaraan menjadi tanggungan operator. Untuk kompensasinya, pendapatan operasi menjadi hak operator. Apabila pendapatan operasi lebih rendah dibandingkan biaya pembelian, defisit ditanggung operator. Sedangkan prinsip model kerjasamanya yaitu *The Lowest Subsidy*, *Affordability* dan *Sustainability*. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kemkominfo RI memberikan uang muka kepada pemenang lelang (penyedia jasa). Selanjutnya, pihak penyedia jasa akan membayarnya dengan cara BP3TI mengurangi uang sewa kepada pihak penyedia, setelah program dinyatakan berjalan. Kinerja MPLIK merujuk pada Service Level Agreement (SLA) antara BP3TI dengan pemang tender (penyedia jasa).

⁴⁰ *Ibid*, hal. 18



Tabel I.7

Parameter Kinerja Penyedia Jasa MPLIK

No	Parameter Kinerja	MPLIK	Keterangan
1.	Jam Operasi	4 jam	-
2.	Status Off	7 Hari < 7 Hari	Tidak dibayar. Dikenakan denda dan tidak dibayar
3.	Jumlah PC	5 PC + 1 server	-
4.	Tarif	Maks Rp2.000,-	-
5.	Bandwith	256 Kbps	-
6.	Status Aset	Milik Pemenang Tender	-
7.	Jenis Kontrak	Sewa Serah	Setelah 48 bulan diserahkan ke Pemda dengan persyaratan kesiapan dukungan APBD

Sumber : Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PLIK/MPLIK dan Radio Komunitas, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo RI.

Dalam penelitian ini program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yaitu suatu bentuk operasional kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang komunikasi dan informatika yang bertujuan memperluas layanan akses internet bagi masyarakat luas sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan.



1.5.3 Evaluasi Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)

Evaluasi implementasi program merupakan suatu langkah yang sangat penting guna mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu program yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini, evaluasi lebih difokuskan pada proses pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), sehingga dapat diketahui pula mengenai pencapaian dari tujuan program tersebut.

Evaluasi implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang dapat disimpulkan pada penelitian ini yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kinerja implementasi dengan melihat pada proses pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang telah dilakukan dan memperhatikan tujuan serta target yang ingin dicapai.

1.5.3.1 Pendekatan Evaluasi Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan evaluasi formal. Evaluasi formal (*Formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah



bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam evaluasi formal analisis menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik: untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Meskipun demikian perbedaannya adalah bahwa evaluasi formal menggunakan Undang-Undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluasi yang paling sering digunakan adalah efektifitas dan efisiensi.

Penelitian ini dilakukan saat program sedang berjalan hingga program selesai diimplementasikan, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan formatif. Pendekatan formatif digunakan ketika penelitian tersebut masih sedang berjalan, sedangkan pendekatan sumatif untuk melihat penelitian ini ketika selesai diimplementasikan yang berkaitan dengan dampak dari program ini.

Evaluasi formatif yaitu meliputi usaha-usaha untuk secara terus-menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target formal. Evaluasi formatif juga terdapat dua macam yaitu evaluasi perkembangan dan evaluasi proses retrospektif. Evaluasi perkembangan, menunjuk pada kegiatan-kegiatan/aktivitas evaluasi yang secara eksplisit diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf program.



Evaluasi perkembangan berguna “untuk mengalihkan staf dari kelemahan yang baru dimulai atau kegagalan yang tidak diharapkan dari program dan untuk meyakinkan layak tidaknya operasi yang dilakukan mereka yang bertanggungjawab terhadap operasinya.”⁴¹

Sementara, evaluasi proses retrospektif meliputi pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi proses retrospektif, yang cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama implementasi kebijakan dan program, tidak diperkenankan dilakukannya manipulasi langsung terhadap masukan (misalnya pengeluaran) dan proses (misalnya sistem pelayanan alternatif). Sebaliknya, evaluasi proses retrospektif lebih menggantungkan pada *deskripsi ex post facto* (retrospektif) tentang kegiatan aktivitas program yang sedang berjalan, yang selanjutnya berhubungan dengan keluaran dan dampak. Evaluasi proses retrospektif mensyaratkan adanya sistem pelaporan yang mantab yang memungkinkan pemunculan yang berkelanjutan informasi yang berhubungan dengan program (misalnya: jumlah kelompok-kelompok sasaran yang dinilai, tipe-tipe pelayanan yang disediakan, dan karakteristik personel yang dipekerjakan pada program-program staf). Sistem informasi manajemen (*Management information system*) pada badan-badan publik kadang-kadang memungkinkan dilakukannya evaluasi proses retrospektif, menyangkut baik informasi tentang proses maupun hasil.⁴²

⁴¹ Dunn, William N., *op.cit*, hal. 11

⁴² *Ibid*, hal. 12



Dari kedua macam evaluasi formatif tersebut yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini yaitu evaluasi proses retrospektif, karena pada evaluasi proses retrospektif cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang.

1.5.3.2 Kriteria Evaluasi Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)

Dalam risalah yang dipublikasikan Usaid, IEES⁴³ mengemukakan argumentasi bahwa dasar dari praktik riset evaluasi adalah distingsi antara kriteria, standar, dan indikator. Kriteria merupakan karakteristik program yang dianggap sebagai basis penting untuk melakukan riset evaluasi pada program tersebut.

Kriteria merupakan karakteristik program yang dianggap sebagai basis relevan dan penting untuk melakukan riset evaluasi. Kriteria merupakan ekspresi (ungkapan) penghargaan (*value*) orang pada suatu program atau proyek. Evaluasi ini didasarkan pada keyakinan, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, dan hasil kajian teori. Kriteria tidak dapat dideduksikan secara logis; karakteristik pembedanya adalah bahwa kriteria itu harus dipilih. Kriteria mewakili atau mempresentasikan *judgements* (pertimbangan) menyangkut apa yang dianggap penting dan menjadi tujuan suatu program.⁴⁴ Oleh karena itu, untuk dapat menentukan kriteria dalam

⁴³ Samsul Hadi, Dkk, *op.cit*, hal. 110

⁴⁴ *Ibid*, hal. 111



penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan menyangkut apa yang dianggap penting dan menjadi tujuan serta menjadi fokus penelitian evaluasi ini yaitu pada proses implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Berikut ini beberapa paparan maupun penjelasan dari masing-masing kriteria dalam evaluasi menurut beberapa ahli:

1. Efektivitas

Kriteria ini merupakan suatu yang berkaitan dengan target pencapaian tujuan dari usaha-usaha yang dilakukan dalam evaluasi implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, menurut peneliti kriteria ini sesuai dengan *reseach problem* pada penelitian ini yaitu mengenai pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan melihat pada aspek kinerja implementasi. Aspek utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu aspek *output* dan *outcome*. Dari kedua aspek tersebut, yang sesuai dengan penelitian ini yaitu aspek *output* karena lebih menekankan pada proses pelaksanaan suatu kebijakan atau program. aspek *output* digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan⁴⁵

Secara umum, apabila kebijakan atau program yang ingin dievaluasi tersebut merupakan kebijakan distributif, yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu anggota masyarakat atau kelompok sasaran yang kurang

⁴⁵ Erwan dan Dyah, *op.cit*, hal. 106



beruntung melalui instrument material seperti pelayanan gratis, subsidi, hibah, dan lain-lain. Menurut Ripley⁴⁶ maka aspek yang digunakan untuk menilai kualitas *policy output* adalah sebagai berikut:

1. Akses

Akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.⁴⁷

Dalam penelitian ini akses diartikan sebagai kemudahan kelompok sasaran dalam memanfaatkan pelayanan yang diberikan

⁴⁶ *Ibid*, hal. 105-110

⁴⁷ *Ibid*, hal. 106



oleh pelaksana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

2. Cakupan (*coverage*)

Cakupan (*coverage*) digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Prosedur yang digunakan untuk menilai cakupan adalah 1). Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran (keluarga miskin, petani, anak sekolah, dan sebagainya). Idealnya evaluator memiliki data seluruh kelompok sasaran yang memiliki hak (*eligible*) untuk menjadi kelompok sasaran tersebut. 2). Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapat layanan terhadap total kelompok target.⁴⁸

Dalam penelitian ini cakupan (*coverage*) diartikan sebagai keterjangkauan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

3. Frekuensi

Frekuensi digunakan untuk menilai seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan, maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program tersebut. Aspek

⁴⁸ *Ibid*, hal. 107-108



frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan atau program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan sekali, namun diberikan berkali-kali, namun berulang kali.⁴⁹

Dalam penelitian ini frekuensi diartikan sebagai Intensitas kelompok sasaran dalam memperoleh layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

4. Bias

Bias digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak *eligible* untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.⁵⁰

Dalam penelitian ini bias diartikan sebagai ketepatan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) pada kelompok sasaran.

5. Ketepatan layanan (*service delivery*)

Ketepatan Layanan (*service delivery*) digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program

⁴⁹ *Ibid*, hal. 108

⁵⁰ *Ibid*, hal. 108



dilakukan tepat waktu apa tidak. Aspek ini sangat penting untuk menilai *output* suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut.⁵¹

Dalam penelitian ini ketepatan layanan (*service delivery*) diartikan sebagai ketepatan waktu pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementor dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan.⁵²

Dalam penelitian ini akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana terkait pemenuhan hak-hak kelompok sasaran Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

⁵¹ *Ibid*, hal. 108-109

⁵² *Ibid*, hal. 109



7. Kesesuaian program dengan kebutuhan

Kesesuaian program dengan kebutuhan ini digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak.⁵³

Dalam penelitian ini kesesuaian program dengan kebutuhan diartikan sebagai Kesesuaian program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian dalam penelitian ini efektivitas merupakan seberapa jauh program yang telah dilaksanakan dapat mencapai tujuannya yaitu mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan.

2. Efisiensi Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi diterjemahkan dengan daya guna. Ini menunjukkan bahwa efisiensi selain menekankan pada hasilnya, juga ditekankan pada daya atau usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak terjadi pemborosan.⁵⁴ Sedangkan, efisiensi menurut

⁵³ *Ibid*, hal. 110

⁵⁴ Syamsi, Ibnu, 2004, *Efisiensi, sistem, dan prosedur kerja*,. PT. Bumi Aksara. Jakarta., hal.2



Ghiselli dan Brown⁵⁵ yaitu “*The term efficiency has a very exact definition, It is expressed as the ratio of output to input.*” Jadi, menurut Ghiselli dan Brown istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Efisiensi berarti menggambarkan hasil yang dicapai suatu program dengan usaha-usaha yang diperkirakan dalam pengertian pemanfaatan masukan (sumber daya) yang digunakan dalam proses pelayanan, sehingga memberikan hasil yang dicapai secara maksimal.

Pada kriteria efisiensi sesuai dengan karakteristik program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini yaitu program pemerintah melalui Kemenkominfo yang pada pelaksanaannya dilaksanakan oleh swasta. Dimana dalam hal ini tidak hanya berusaha mencapai tujuan terkait hasil untuk kelompok sasaran, namun juga terkait untung rugi yang diperoleh pemerintah maupun pihak swasta sebagai pelaksana. Selain itu, kriteria efisiensi ini berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat menjadi faktor penentu efektivitas karena menunjukkan nisbah biaya dan keuntungan yang harus dipikul dalam mengejar tujuan tertentu. Pada penelitian ini efisiensi diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pelaksana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki (dana dan SDM) untuk mencapai tujuan yang mendukung

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 4



perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan.

Secara umum, efisiensi berkaitan dengan: 1. *Input*, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan tertentu, misalnya dalam penelitian ini terkait dengan sumber dana dan Sumber Daya Manusia; 2. *Output*, yaitu suatu hasil dari pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan, misalnya dalam penelitian ini terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Implementasi Program.

I.6. Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu instrumen penting dalam penelitian. Konsep yaitu suatu fakta atau fenomena ataupun gejala-gejala yang menjadi perhatian dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan dalam sub-bab sebelumnya, konsep-konsep yang relevan dalam konteks penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi

Merupakan prosedur penilaian pelaksanaan kerja dan hasil kerja secara menyeluruh dengan membandingkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, serta menilai seberapa jauh telah terjadi penyimpangan dan ketidakpastian sehingga dapat segera memberikan rekomendasi guna memperbaiki pelaksanaan suatu kebijakan atau program.



2. Implementasi

Merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Program

Merupakan suatu bentuk operasional dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu.

4. Evaluasi Program

Suatu proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan standar baku yang telah ditetapkan guna mengetahui apakah tujuan program sudah terealisasi.

5. Evaluasi Implementasi Program

Penilaian terhadap serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dalam rangka melaksanakan keputusan yang telah dibuat yang diwujudkan dalam pelaksanaan program dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

6. Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)

Suatu bentuk operasional kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang komunikasi dan informatika yang bertujuan memperluas layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan.



7. Evaluasi Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kinerja implementasi dengan melihat pada proses pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang telah dilakukan dan memperhatikan tujuan dan target yang ingin dicapai.

8. Efektivitas

Seberapa jauh program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang telah dilaksanakan dapat mencapai tujuannya yaitu mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan.

9. Akses

Kemudahan kelompok sasaran dalam memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh pelaksana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

10. Cakupan (*coverage*)

Keterjangkauan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

11. Frekuensi



Intensitas kelompok sasaran dalam memperoleh layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

12. Bias

Ketepatan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) pada kelompok sasaran.

13. Ketepatan Layanan (*service delivery*)

Ketepatan waktu pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

14. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban pelaksana terkait pemenuhan hak-hak kelompok sasaran Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

15. Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan

Kesesuaian program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dengan kebutuhan masyarakat.

16. Efisiensi

Suatu usaha yang dilakukan oleh pelaksana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) berkaitan sumber daya yang dimiliki (dana dan SDM) untuk mencapai tujuan yang mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan serta pemanfaatannya untuk tujuan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kecamatan.



17. Input

Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan tertentu.

18. Output

Suatu hasil dari pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan.

I.7. Metode Penelitian

Metode adalah keseluruhan proses berpikir mulai dari menemukan permasalahan menjabarkannya dalam suatu kerangka teoretis tertentu, pengumpulan data bagi pengujian empiris sampai dengan penjelasan dan penarikan gejala sosial yang diteliti. Sedangkan, metode penelitian adalah cara pengumpulan data dan alat pengumpulan data.⁵⁶ Dengan memperhatikan perumusan masalah serta tujuan penelitian ini, maka metodologi penelitian yang akan digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pengertian tentang metode kualitatif menurut Bogden dan Taylor, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁷

Pada riset evaluasi ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan berfokus pada proses implementasi program. Sehingga, dalam evaluasi yang berfokus pada proses implementasi program menguraikan secara deskriptif tentang berjalannya program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang.

⁵⁶ Soeharto, Irawan. 2008, *Metode Penelitian Sosial. Cet. VII*, PT Remaja Rosdakary Offset, Bandung, hal. 9

⁵⁷ Moleong, Lexy. J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: hal. 4



1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian evaluatif. Kemudian pendekatan dalam evaluasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan evaluasi formal, dimana menurut Dunn⁵⁸ evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program.

Selanjutnya, tipe evaluasi formal yang sesuai dengan penelitian ini yaitu tipe evaluasi formatif. Evaluasi formatif meliputi usaha-usaha untuk secara terus-menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target formal.⁵⁹ Menurut Patton⁶⁰ evaluasi formatif menitikberatkan pada pengumpulan informasi deskriptif tentang kualitas kegiatan program dan hasilnya.

Pada evaluasi formatif terdapat 2 (dua) jenis yaitu evaluasi perkembangan dan evaluasi proses retrospektif. Namun, yang relevan dan digunakan pada penelitian ini yaitu evaluasi proses retrospektif. Evaluasi proses retrospektif meliputi pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu.⁶¹

⁵⁸ Dunn, William N., *op.cit*, hal. 15

⁵⁹ *Ibid*, hal. 16

⁶⁰ Patton, Michael Quinn, *op.cit*, hal. 41

⁶¹ Dunn, William N., *op.cit*, hal. 16



1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang yang merupakan tempat dimana pelaksana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang. Selain itu, penelitian dilakukan di Kantor Dinas, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang yang merupakan Instansi terkait dengan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Terdapat beberapa masalah mengenai keterbatasan akses internet di Kabupaten Malang dikarenakan sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Malang merupakan wilayah perdesaan dengan akses internet yang belum mumpuni. Dari permasalahan tersebut program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) hadir untuk memberikan kemudahan akses bagi wilayah yang sulit untuk mengakses internet.

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Keberadaan informan sangat penting dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dan data mengenai obyek yang diteliti. Dalam pemilihan informan Spradley⁶² mengajukan beberapa kriteria yaitu :

1. Mereka yang cukup lama dan intensif “menyatu” dengan suatu kegiatan atau “medan aktifitas” yang menjadi sasaran perhatian penelitian. Subyek tidak hanya sekedar memberi informasi, tetapi juga telah menghayati secara sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang telah cukup lama

⁶² Prastowo, Andi, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, hal. 27



pada lingkungan yang bersangkutan. Hal ini di tandai dengan kemampuan memberikan informasi yang “di luar kepala” tentang sesuatu yang di tanyakan.

2. Mereka yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan/kegiatan yang menjadi sasaran/perhatian penelitian.
3. Mereka yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk di mintai informasi.
4. Mereka yang dalam memberikan informasi tidak cenderung “diolah” atau “dikemas” terlebih dahulu. Persyaratan ini cukup penting terutama bagi peneliti pemula yang biasanya masih cukup sukar mengatasi informan yang cenderung “mengemas” informasi dengan bias pribadinya. Persyaratan ini berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih deskriptif/faktual.
5. Mereka yang sebelumnya tergolong masih “asing” dengan peneliti, sehingga peneliti dapat merasa lebih tertantang untuk “belajar” sebanyak mungkin dari subyek yang semacam guru baru bagi dirinya. Dalam banyak pengalaman, persyaratan ini terbukti merupakan faktor yang cukup penting bagi produktifitas perolehan informasi di lapangan.

Menurut Patton⁶³ pada tahap kerja penelitian, informan kunci dapat menjadi sumber informasi penting. Informan kunci adalah orang yang sangat berpengetahuan dan bisa menyampaikan gagasan, orang yang pandangannya dapat menambah

⁶³ Patton, Michael Quinn, *op.cit*, hal. 41



berguna dalam membantu pengamat memahami apa yang sedang terjadi. Satu dari arus utama kerja penelitian adalah penggunaan informan kunci sebagai sumber tentang apa yang oleh pengamat evaluasi tidak memiliki atau tidak dapat mengalami, sebaik sebagai sumber penjelasan bagi hal-hal yang sebenarnya telah disaksikan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang memiliki posisi terbaik untuk memberikan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu evaluasi implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Adapun informan yang di pilih menggunakan teknik tersebut merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami mengenai implementasi Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Berikut daftar nama informan dalam penelitian ini, seperti yang terlihat pada Tabel I.8



Tabel I.8

Daftar Nama Informan Dishubkominfo dan MPLIK Kabupaten Malang

No	Nama	Jabatan
1	Bapak Khoirul Anwar	Kabid Kominfo Kabupaten Malang
2	Bapak Adi Firmansyah	Kepala Cabang program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang
3	Bapak Kendy	Operator program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang
4	Mbak Jeni	Bagian administrasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang
5	Bapak Sunawan	<i>Driver</i> program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang
6	Bapak Joni	Operator program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang
7	Bapak Sumarno	Lembaga Pendidikan pengguna program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang
8	Ibu Sri Utami	Lembaga Pendidikan pengguna program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang



1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, dimana kedudukan peneliti sebagai instrumen utama yang menyatu dengan sumber data yang diamati, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti meliputi :

1. Observasi

Menurut Young dan Schmidt⁶⁴ observasi merupakan sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus diberikan kepada unit kegiatan yang lebih besar atau lebih luas pada fenomena-fenomena khusus yang diamati terjadi. Jadi observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti.

Selanjutnya, menurut Creswell⁶⁵ observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya periset evaluasi turun langsung ke lapangan di lokasi riset, baik secara struktur maupun semi struktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh periset). Peran periset evaluasi kualitatif juga dapat terlibat dalam peran beragam, mulai dari sebagai nonpartisipan hingga partisipan utuh. Kemudian, menurut Patton⁶⁶ data hasil evaluasi terdiri dari deskripsi mendalam mengenai kegiatan

⁶⁴ Pasolong, Harbani, 2013, *Kepemimpinan Birokrasi*, CV.Afabeta, Bandung, hal.131

⁶⁵ Samsul Hadi, Dkk, *op.cit*, hal. 255

⁶⁶ Patton, Michael Quinn, *op.cit*, hal. 1



suatu program, perilaku para peserta, aksi para staf dan interaksi antar manusia yang dapat menjadi bagian dari pengalaman program.

2. Wawancara

Pasolong⁶⁷ menjelaskan wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interview*. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung (*personal interview*) maupun tidak langsung (*telephone atau mail interview*).

Selanjutnya, menurut Creswell⁶⁸ dalam wawancara kualitatif, periset evaluasi dapat melakukannya dengan cara *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan. Mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam *focus group interview* (interview dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang didesain untuk memunculkan pandangan atau opini partisipan. Kemudian Patton⁶⁹, menjelaskan bahwa data wawancara terbuka terdiri dari kutipan langsung dari orang tentang pengalaman, opini, perasaan, dan pengetahuannya.

⁶⁷ Pasolong, Harbani, *Op.cit*, hal.137

⁶⁸ Samsul Hadi, Dkk, *op.cit*, hal. 258

⁶⁹ Patton, Michael Quinn, *op.cit*, hal. 1



Penelitian ini menggunakan teknik wawancara karena ingin mengetahui secara jelas dan mendalam bagaimana kemitraan tersebut berlangsung. Instrumen yang digunakan berupa *interview guide* (panduan wawancara), yang ditunjang dengan perekam suara.

3. Dokumen

Dalam riset evaluasi program atau proyek, contoh dokumen antara lain adalah jenis kebijakan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh organisasi objek kajian.⁷⁰ Ada dua jenis dokumen yang umum digunakan, yaitu dokumen publik (surat keputusan kebijakan, petunjuk pelaksanaan, harian umum, majalah atau terbitan berkala program, makalah, laporan pelaksanaan, dan lain-lain), dan dokumen privat seperti buku harian (*diary*) peserta program, surat-menyurat anggota program, atau e-mail.⁷¹ Sementara, menurut Patton⁷² dokumen dapat berupa dokumen tertulis, termasuk sumber-sumber tertulis dari hasil wawancara terbuka pada kuesioner, buku harian seseorang dan catatan program.

Dokumen yang diperoleh dan digunakan pada penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang, Inventaris Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang dan Salinan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyediaan

⁷⁰ *Ibid*, hal. 256

⁷¹ *Ibid*, hal. 257

⁷² Patton, Michael Quinn, *op.cit*, hal. 1



Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan serta sumber-sumber tertulis dari hasil wawancara terbuka pada kuesioner.

1.7.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Seorang peneliti yang melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat, dianggap melakukan suatu upaya guna menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Pada penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong⁷³, teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan segala sesuatu yang lain di luar data yang telah diperoleh untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin⁷⁴ menengarai empat tipe dasar triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian, sebagai contoh, mewawancarai orang pada posisi status yang berbeda dengan titik pandang yang berbeda.
2. Triangulasi investigator, yaitu penggunaan beberapa evaluator atau ilmuwan sosial yang berbeda.
3. Triangulasi teori, yaitu penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal data.

⁷³ Moleong, Lexy J., *Op.cit*, hal.330

⁷⁴ Patton, Michael Quinn, *op.cit*, hal. 99



4. Triangulasi metodologis, yaitu penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur, dan dokumen.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷⁵

Pada penelitian ini, untuk dapat mempertanggungjawabkan keabsahan data, peneliti melakukan usaha dengan membandingkan antara apa yang peneliti amati terkait proses pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang dengan hasil wawancara dengan informan yang dianggap peneliti mengerti lebih dalam tentang pelaksanaan program ini. Informan

⁷⁵ Moleong, Lexy J., *Op.cit*, hal.330-331.



yang dimaksud peneliti merupakan bagian terkait proses pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yaitu pelaksana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang sebagai Dinas terkait program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dan Masyarakat pengguna layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang.

Selanjutnya, hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan kemudian dibandingkan dengan hasil pengamatan maupun isi dokumen yang peneliti dapat selama proses penelitian, misalnya laporan realisasi anggaran Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang, Inventaris Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang dan Salinan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan data selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah analisa data. Menurut Bogdan dan Biklen⁷⁶, analisa data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari

⁷⁶ *Ibid*, hal, 248



dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Milles dan Huberman⁷⁷, dalam menganalisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Data-data yang peneliti kumpulkan merupakan data yang menurut peneliti sesuai dengan *research problem* pada penelitian ini yaitu apakah implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang sesuai dengan rencana implementasi yang telah ditetapkan.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

⁷⁷ Ulber, Silalahi. *op.cit.* hal, 339



uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Pada penelitian ini penyajian data disusun dalam bentuk narasi maupun tabel yang peneliti olah sesuai temuan peneliti pada saat melakukan penelitian terkait evaluasi implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang.

3) Conclusion Drawing/verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan yang peneliti buat terkait proses implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang merupakan suatu simpulan yang sebelumnya peneliti analisis dengan menggunakan data empiris di lapangan. Data empiris tersebut dapat berupa



hasil wawancara, hasil pengamatan di lapangan maupun dokumen yang telah didapatkan.

1.7.7 Data yang Dikumpulkan

Guna memudahkan peneliti dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini, maka dibutuhkan beberapa data yang dijadikan pedoman untuk mendukung kelengkapan data serta informasi terkait penelitian ini. Data yang dikumpulkan selama penelitian di Kantor Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang, mengenai evaluasi implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang seperti yang terlihat pada Tabel I.9



PENDAHULUAN

Tabel I.9

Kriteria Evaluasi Proses Implementasi Program MPLIK Kabupaten Malang

NO	Kriteria	Aspek	Aspek Yang Dinilai
1	Efektivitas	<ol style="list-style-type: none">1. Akses2. Cakupan (<i>coverage</i>)3. Frekuensi4. Bias5. Ketepatan layanan (<i>service delivery</i>)6. Akuntabilitas7. Kesesuaian program dengan kebutuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Kemudahan kelompok sasaran dalam mengakses atau menggunakan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)2. Keterjangkauan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)3. Intensitas kelompok sasaran dalam memperoleh layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)4. Ketepatan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) pada kelompok



PENDAHULUAN

Lanjutan dari halaman I-77

			<p>sasaran</p> <ol style="list-style-type: none">5. Ketepatan waktu pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)6. Pertanggungjawaban pelaksana terkait pemenuhan hak-hak kelompok sasaran Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)7. Kesesuaian program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dengan kebutuhan masyarakat.
2	Efisiensi	<ul style="list-style-type: none">• <i>Input</i> <ol style="list-style-type: none">1. Sumber Dana2. Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Sumber dana dalam program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)2. Lembaga pelaksana terkait program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)
		<ul style="list-style-type: none">• <i>Output</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan realisasi anggaran program Mobil Pusat



PENDAHULUAN

Lanjutan dari halaman I-78

		1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Implementasi Program	Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) 2. Laporan implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)
--	--	--	--